ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS

Sutowijoyo

Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

ABSTRACT

The crime of identity fraud in marriage has occurred in Jember Regency. The identity falsification was carried out because the perpetrator wanted to manipulate his gender in order to carry out same-sex marriage. This happens because the law in Indonesia does not provide legality for same-sex people to be able to get married. Thus, in this study, two formulations of problems that should be investigated are related to the causes of the motive for committing the crime of identity fraud in marriages committed by same-sex couples; as well as regarding law enforcement against the crime of identity fraud in marriage. From the two formulations of the problem, the results obtained are that the cause of the motive for the criminal act of forging identity in same-sex marriages is the feeling of wanting to live together with same-sex partners and the coercion of will because Indonesia does not provide space for same-sex marriage. Second, law enforcement in cases of identity falsification in same-sex marriages is carried out through the Court as law enforcers. The crime of identity fraud can be prosecuted under Article 263 paragraph (1) (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.

Keywords	<i>Crime; Marriage; Identity Falsification; Homosexual</i>
Cite This Paper	Sutowijoyo. (2022). Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis. <i>Legal Spirit</i> , 6(1).

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.¹ Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di atur oleh negara dengan terperinci dan lengkap.

Dalam kaitannya, setiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.² Tiap-tiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan pernikahan.

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta, 2016), hlm. 23

² Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2008), hlm. 130

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama.³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dan wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau berlawanan jenis.

Berbicara tentang perkawinan maka tidak akan terlepas dengan hubungan privat atau pribadi antar individu, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan akan terdapat perbuatan hukum antar individu baik itu sebelum dan sesudah perkawinan itu terlaksanakan yang akan menimbulkan akibat hukum.⁵ Akibat hukum tersebut dapat berupa kedudukan dan tanggung jawab antara suami atau istri dalam perkawinan yang dalam pelaksanaannya bisasaja menimbulkan benturan atau kerugian bagi setiap kepentingan secara pribadi, sehingga terhadap benturan atau kerugian tersebut bagi sebuah negara hukum haruslah memiliki tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakatnyadengan disediakannya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa.⁶

Sumber dari hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷ Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga aturan lain yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸ Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Putusnya hubungan pernikahan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.⁹ Dari ketentuan dalam aturan hukum perkawinan itu sendiri maka dapat dilihat juga bahwa unsur seorang pria dan seorang wanita sebagai pihak yang akan melaksanakan perkawinan merupakan syarat mutlak agar perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan dikatakan sah.¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut yang menyatakan perkawinan bertujuan membentuk keluarga dengan adanya anak yang dihasilkan dalam perkawinan dari seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan biologis antara suami istri.¹¹

Perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali berita-berita tentang penyimpangan sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial yang sering diberitakan di dunia maya seperti

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta, 2001), hlm. 374

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, 1999), hlm. 3

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta, 2005), hlm. 271

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta, 2005), hlm. 12

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Indonesia* (Jakarta, 2006), hlm. 244

⁸ *Ibid.* hlm. 245

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 9

¹⁰ Keputusan Ijtima', Masail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer), Masail Qanuniyyah (Hukum Dan Perundang-Undangan), (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 98

¹¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta, 1996), hlm. 1

media sosial dan sebagainya adalah perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut dengan istilah homoseksual dan perempuan dengan perempuan atau yang sering disebut dengan lesbian. Tak jarang sebagian kelompok penyimpangan perilaku seksual tersebut menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan undang-undang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah salah ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh homoseksual banyak mendapatkan kontroversi di masyarakat karena dianggap menyalahi kodrat, menyimpang dari hukum dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan.

Dengan berjalannya waktu, perkawinan yang didasarkan pada penyatuan dua individu yang berlainan jenis (lawan jenis) untuk mengikat hak dan kewajiban, kini telah bergeser pada gencarnya pelaku homoseksualitas untuk bisa melakukan perkawinan sesama jenis. Dengan melihat bahwa di negara ini perkawinan sejenis dilarang, maka para pelaku homoseksual melakukan segala cara agar keinginannya untuk menikah dengan pasangan sesama jenisnya dapat tercapai. Segala cara dilakukannya demi keinginan dan nafsu semata, seperti halnya memalsukan identitas dirinya atau pemalsuan jenis kelamin yang mana tidak sesuai dengan identitas yang terdahulu melekat pada dirinya. Kasus tersebut sudah terjadi bahkan sampai menginjak jenjang perkawinan sah. Pemalsuan identitas jenis kelamin/bilogis ini dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan perkawinan. Dimana saat akan melangsungkan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materi dari perkawinan yang sah.

Sekarang fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan terkait syarat-syarat perkawinan ini di mana penyimpangan tersebut salah satunya mengenai pemalsuan identitas jenis kelamin, setidaknya telah terjadi beberapa kasus yang terjadi terkait pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya seperti kasus di Kabupaten Jember, yakni pada Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Jmr menyatakan bahwa terdakwa SB alias Ayu dan MF telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama, yang mana sebelumnya telah dilakukan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Kronologisnya bahwa SB yang berkelamin laki-laki memalsukan identitasnya dengan mengakui bahwa dirinya berkelamin perempuan dengan nama Ayu Puji Astuti. Sedangkan MF sebagai pasangan sejenisnya ikut membantu dan mengetahui bahwa Ayu yang sebenarnya adalah SB telah memalsukan surat/identitas nya sebagai perempuan. Dengan melihat hal tersebut, pasangan tersebut ingin melegalkan dirinya secara sepihak agar hubungan sejenisnya dapat diakui dimata hukum. Pasangan pernikahan sesama jenis di Jember, Jawa Timur, MF dan SB dituntut hukuman satu tahun penjara. SB disebut memalsukan KTP untuk berganti identitas menjadi Ayu Puji Astuti agar bisa menikah dengan MF. Kedua terdakwa terbukti secara meyakinkan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Kasus lainnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Soppeng. Pernikahan sejenis antara MT dan MTR di Desa Baringeng, Kecamatan Ririlau, Kabupaten Soppeng, Selasa 9 Juni 2020 terungkap setelah tamu undangan curiga akan perawakan mempelai pria yang mirip wanita. Lantaran menjadi buah bibir, komunikasi antara kepala desa pun berjalan dan mengungkap fakta yang mencengangkan di mana MTR adalah seorang wanita alias mempelai pria palsu. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng Ilham membantah telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada MTR. MTR (24) merupakan mempelai pria yang belakangan diketahui seorang wanita. Meski demikian, pihak Dukcapil mengakui MTR pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran. Namun, hal tersebut tidak terlaksana dikarenakan MTR tak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan dari suatu kebijakan hukum terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya diperoleh beberapa perumusan masalah yakni: masalah apa yang menyebabkan motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis?; serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari adanya motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian Hukum Normatif adalah Jenis penelitian yang mana mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Tahapan pertama penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada tersebut. Kemudian tahapan kedua penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subyektif (Hak dan Kewajiban).¹³ Penelitian ini hanya ditujukan pada asas hukum, konsep, prinsip-prinsip hukum serta peraturan-peraturan tertulis dengan melihat kasus-kasus yang terjadi sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Selanjutnya, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam pemecahan masalah dengan cara pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi (*the statute approach*).¹⁴ Berdasarkan Perumuan Masalah dan Tujuan Penelitian diatas, Jenis Pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta dengan dukungan pada Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motif penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis

Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin sama atau identitas gender yang sama. Bagi orang yang mempunyai ketertarikan dengan sesama jenis biasa disebut homoseksual, istilah ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin; kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.¹⁵

Dalam Islam, homoseksual disebut liwath atau "*amal qauni luthin*". Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 2009) hlm. 13-14

¹³Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50

¹⁴ *Ibid.* hal. 97

¹⁵ Abdul Aziz Ramadhani, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Makassar, 2012), hlm. 30

terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus, mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.¹⁶

Perkawinan sejenis dipandang oleh masyarakat sebagai suatu kekejian yang menyalahi kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang mana seharusnya manusia melakukan perkawinan dengan lawan jenis kelamin sebagai tujuan perkawinan yakni untuk melanjutkan keturunan. Namun berbeda dengan perkawinan sejenis yang lebih menginginkan hubungan menyimpang tersebut atas dasar cinta kasih sayang guna membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.¹⁷ Pengakuan hukum perkawinan sesama jenis kadang-kadang disebut sebagai kesetaraan perkawinan atau pernikahan setara, terutama oleh para pendukungnya.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya perkawinan sesama jenis sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pemalsuan identitas, yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri;
- b. Ketidakteraturan dan kelemahan sistem administrasi kependudukan pintu utama untuk melakukan pemalsuan identitas;
- c. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat;
- d. Modusnya, tahu sama tahu, komitmen untuk merahasiakan ditambah dengan iming-iming sejumlah uang, selebar kartu tanda penduduk palsu dapat diperoleh;
- e. Perangkat aparat yang negotiable atau modus konspirasi (persengkokolan), masih tetap eksis sampai sekarang;
- f. Kurang bagus koordinasi antara pejabat atau petugas pencatatan perkawinan yang berwenang menanganinya;
- g. Karena tidak ada ruang hukum bagi kaum sesama jenis untuk menikah dengan sesama jenisnya, karena hukum di Indonesia mengakui perkawinan bisa dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan;
- h. Adanya dorongan batin untuk bisa hidup bersama dengan pasangan sejenisnya, hal ini menunjukkan bahwasannya orientasi seksual yang dimiliki oleh orang yang merasa dirinya penyuka sesama jenis tidak senada dengan gender yang dimilikinya saat ini;
- i. *Psycosocial*, maksudnya kaum gay dan lesbian membentuk identitas dirinya mulai sejak usia dini melalui hubungan dan interaksi yang kompleks atau secara biologis, psikologis dan faktor-faktor sosial lainnya
- j. Diskriminatif, maksudnya kaum gay dan lesbian belum memiliki ruang atau wilayah yang menurutnya belum dapat diterimanya di masyarakat yang pluralis dan multikultural, sehingga kaum gay dan lesbian membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi yang menuntut adanya legalisasi hak asasi manusia seperti halnya perkawinan sejenis tersebut. Adapun jenis dari diskriminasi dalam hal ini disebut sebagai diskriminasi gender.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁸ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju tidak dapat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Makhfudz, "Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum, Jurnal Hukum, UNDIP, Semarang 2010, hlm. 21

¹⁸ Adami Ch.azawi, *Op. Cit.*, hlm. 7

berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya, karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Perihal tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana diatur dalam Bab XII KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁹ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP di mana dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Pasal 263 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan surat yang dalam hal ini adalah surat yang menjelaskan identitas seseorang. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 266 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut dituliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, di mana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu di dalam suatu perkawinan.

Pasal 266 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam pidana bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, dan bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta, 2001), hlm. 97

Dalam peristiwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin, yang menjadi titik penyimpangan atau cacat hukumnya ialah seperti yang dimaksud pada isi Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yakni data perseorangan seperti jenis kelamin, yang mana umumnya terdapat pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, di mana pengertian dari jenis kelamin itu sendiri yakni suatu bentuk gender yang membedakan antara seorang pria dan wanita.

Pemalsuan identitas jenis kelamin atau biologis ini dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan perkawinan, di mana saat akan melaksanakan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materiil dari perkawinan yang sah. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman dari dilakukannya pemalsuan identitas jenis kelamin atau biologis dalam suatu perkawinan itu adalah kenyataan dari salah satu mempelai sebagai penyandang jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin sesungguhnya.²⁰

Peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin ini biasanya terdapat pada saat memenuhi persyaratan formil seperti melakukan pendaftaran pencatatan kehendak melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada tahapan ini, para calon yang menyatakan kehendak akan melaksanakan perkawinan menyerahkan dokumen dan data-data dirinya untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapannya dan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat perkawinan yang sah baik syarat materiil umum atau khusus.

Dari peristiwa pemalsuan identitas dapat dilihat adanya penyimpangan dari syarat perkawinan yang sah sehingga adanya cacat hukum dari terlaksananya perkawinan dari pemalsuan identitas jenis kelamin. Jika ditinjau dari ketentuan yang dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan terdapat unsur yang menyimpang dari peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin dalam melaksanakan perkawinan yakni terhadap unsur yang menyatakan bahwa adanya ikatan perkawinan itu dilakukan oleh pria dan wanita.

Hal ini menandakan ipeperkawinan itu hanya dapat dilakukan oleh jenis kelamin yang berbeda. Dalam hukum Islam, terdapat juga ketentuan yang senada seperti itu di mana dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 yang menyatakan dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan wanita. Kemudian perkawinan yang mengharuskan dilakukan oleh pria dan wanita juga diatur dalam ketentuan syarat-syarat perkawinan sah baik berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai kehendak untuk melaksanakan perkawinan hanya dinyatakan oleh calon mempelai pria dan wanita.²¹

Ketentuan ikeharusan ipria dan iwanita yang menjadi calon yang mengikatkan diri dalam perkawinan diatur juga pada Pasal 14, Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa syarat utama dari perkawinan yang sah ialah adanya pria dan wanita yang menjadi kedua calon mempelai dalam menyatakan kehendaknya melaksanakan perkawinan.²² Sehingga dari syarat ini menggambarkan dalam perkawinan itu tidak diperbolehkan adanya pernikahan yang sesama jenis baik itu dari kehendak bersama ataupun dari salah satu calon mempelai tanpa diketahui calon mempelai lainnya yang menggunakan perbuatan pemalsuan identitas jenis kelamin tersebut.

Terhadap tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang sah berupa calon mempelai perkawinan ialah pria dan wanita dengan terjadinya perkawinan yang dilaksanakan

²⁰ Alimin Mesra, *Artikel Verifikasi Identitas Biologi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. XII. Juli 2012, hlm. 25

²¹ Wahyono Darmabrata, *Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta, 2004), hlm. 22

²² Neng Djubaedah, *et. al., Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2005), hlm. 62

dengan adanya salah satu calon yang memalsukan identitas jenis kelaminnya mengakibatkan tujuan dari suatu perkawinan yang sah dan sakral itu tidak terpenuhi dan rusak. Tujuan dari perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tujuan tersebut maksudnya ialah membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan sangat erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadikan semua itu hak dan kewajiban kedua orang tua.²³

Dari tujuan perkawinan tersebut disimpulkan salah satunya adalah adanya keturunan dalam perkawinan, di mana keturunan tersebut hanya dapat dicapai dengan perkawinan sah yang dilangsungkan oleh pria dengan wanita yang dapat melakukan hubungan biologis ataupun melakukan persetubuhan. Sehingga dengan terjadinya pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu akibat perkawinan yang sejenis yang mana dalam hal ini sudah pastinya tidak akan dapat memperoleh suatu keturunan dari perkawinannya.

Jadi dari beberapa penjelasan pemalsuan identitas jenis kelamin yang dikaitkan dengan ketentuan syarat serta tujuan dari perkawinan sah tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap peristiwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin adalah tidak terpenuhinya syarat utama dari perkawinan yang sah yaitu hanya seorang pria dan wanita sajalah yang dapat melakukan perkawinan. Sebagai contoh salah satu calon mempelai yang seharusnya dalam data identitasnya adalah jenis kelamin wanita dengan memalsukan dokumen identitas jenis kelamin tersebut berubah menjadi identitas jenis kelamin pria dapat menimbulkan suatu perkawinan yang sejenis yang mana dari perkawinan tersebut tidak akan mencapai suatu tujuan perkawinan yang mulia yaitu memperoleh keturunan (anak) dalam suatu perkawinan tersebut dan terhadap perkawinan sejenis yang terjadi karena pemalsuan identitas berakibat perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan.

Mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas jenis kelamin itu sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 63 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah pengadilan agama bagi agama islam dan pengadilan negeri bagi agama non-islam

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.²⁴ Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata batal yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada, jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

Permohonan ipembatalan iperkawinan idiajukan ikepada ipengadilan idalam idaerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suamiisteri, suami atau isteri, jadi instansi pemerintah atau lembaga lain di luar pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan.²⁵ Batalnya suatu

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu, 1993), hlm. 4

²⁴ 8 Penjelasan Umum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Penjelasan Umum Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²⁶ Selanjutnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan perkara pembatalan perkawinan merupakan masalah hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim, karena hal ini melihat kepada akibat dari dibatalkannya perkawinan yang akan merugikan banyak pihak terutama anak serta mencoreng nama baik suami dan istri. Diterima atau ditolaknya perkara permohonan pembatalan perkawinan ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pihak yang terkait maupun negara karena putusannya harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan selain untuk kemaslahatan semua pihak juga untuk menjalankan sistem perundang-undangan sebagai upaya mengedepankan profesionalisme hakim yang bertugas sebagai penengah dalam setiap perkara yang diajukan ke lembaga peradilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berperan penting dalam membatalkan perkawinan karena terdapatnya pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan mempelai. Sebagai lembaga peradilan tentunya para pemohon pembatalan perkawinan karena terdapatnya pemalsuan identitas jenis kelamin dalam memerlukan keadilan terhadap perlindungan hak asasi manusianya, dan oleh karena itu pengadilan negeri dan pengadilan agama harus melindungi hak asasi dari salah satu pasangan yang dirugikan akibat adanya pemalsuan identitas jenis kelamin dalam suatu perkawinan.

Kembali pada bahasan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah sangka dalam hal ini adalah seorang suami yang mengira istrinya adalah perempuan padahal kenyataannya adalah laki-laki atau sebaliknya seorang istri yang menyangka suaminya adalah seorang laki-laki tapi kenyataannya adalah perempuan, sehingga terhadap peristiwa ini dapat dimintakan pembatalan perkawinan ke pengadilan sesuai tempat dimana mereka melangsungkan pencatatan pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa motif penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan sesama jenis adalah 1) Karena tidak ada ruang hukum bagi kaum sesama jenis untuk menikah dengan sesama jenisnya; 2) Adanya dorongan batin untuk bisa hidup bersama dengan pasangan sejenisnya; dan 3) Diskriminatif, maksudnya kaum gay dan lesbian belum memiliki ruang atau wilayah yang menurutnya belum dapat diterimanya di masyarakat yang pluralis dan

²⁶ Penjelasan Umum Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

multikultural. Selanjutnya, perkara tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan sesama jenis dilakukan melalui Pengadilan sebagai penegak hukum. Tindak pidana pemalsuan identitas dapat dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darmabrata, Wahyono. et. al. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Djubaedah, Neng. et. al. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca Pub
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung
- Keputusan Ijtima'. 2009. *Masail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer), Masail Qanuniyyah (Hukum Dan Perundang-Undangan)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Dina Utama Semarang
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ramadhani, Abdul Aziz. 2012. *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Makassar
- Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasyid, Sulaiman. 2001. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu
- Sahrani, Sohari. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. et. al. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenata Media
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Jurnal Ilmiah:

- Makhfudz, Muhammad. "Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum. Jurnal Hukum, Semarang: UNDIP Tahun 2010
- Mesra, Alimin. *Artikel Verifikasi Identitas Biologi*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. XII. Juli 2012

Rusli, Hardijan. *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006